



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 176/BUA.4/PW1.1.1/X/2024 Jakarta, 24 Oktober 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP
Tahun 2023 Terkait Tanah dengan
Utilisasi 0%

Yth. Para pejabat pada daftar terlampir
di Satuan Kerja Masing-masing

Dalam rangka menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Surat Edaran Plt. Kepala Biro Perlengkapan Nomor 121/BUA.4/PW1.4/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 terkait Tanah dengan Utilisasi 0%, terdapat dokumen tambahan yang harus dilengkapi oleh satuan kerja sesuai masing-masing kategori yang dipilih dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kategori	Dokumen yang harus dilengkapi
1	Digunakan	Surat Keterangan KPB, Foto Bangunan/Fasilitas yang berdiri di atas tanah
2	Tidak Digunakan dan Tidak Ada Rencana Penggunaan	Surat Keterangan KPB
3	Tidak Digunakan dan Ada Rencana Penggunaan	Surat Keterangan KPB dan TOR
4	Sudah Mengajukan RKBMN	Surat Keterangan KPB dan Dokumen RKBMN
5	Dalam Proses Pembangunan	Surat Keterangan KPB, Dokumen Kontrak, RAB, Kartu KDP
6	Akan dipindahtanggankan (Hibah/Alih Status)	Surat Keterangan KPB (mandatory), Surat Permohonan Alih Status (jika ada), Surat Keterangan Bersedia Menerima Hibah (jika ada)
7	Sebab Lainnya	Surat Keterangan KPB (mandatory) dan Dokumen Lainnya (jika ada)

Untuk itu, satuan kerja terkait diminta untuk menambahkan dokumen yang belum lengkap pada tautan (*link*) berikut: <https://bit.ly/DataDukungTanahUtilisasi0> paling lambat pada 31 Oktober 2024

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perlengkapan,



Ditandatangani secara elektronik
Sahwan

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.



LAMPIRAN

Surat Plt. Kepala Biro Perlengkapan

BUA Mahkamah Agung RI

Nomor : 176/BUA.4/PW1.1.1/X/2024

Tanggal : 24 Oktober 2024

DAFTAR PIMPINAN SATUAN KERJA

1. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
2. Sekretaris Badan Pengawasan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
6. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi
7. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia
8. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia

Plt. Kepala Biro Perlengkapan,



Ditandatangani secara elektronik
Sahwan

